

# Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”; Pendekatan Diplomasi Multijalur

Sukawarsini Djelantik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia [sukedj@unpar.ac.id](mailto:sukedj@unpar.ac.id)

## Abstrak

Tahun 2020 dunia menghadapi bencana pandemi global COVID-19 dan krisis kesehatan terbesar sejak Perang Dunia ke 2. Untuk mengatasi penyebaran wabah, hampir seluruh dunia menerapkan kebijakan “lockdown” atau penutupan negara atau kota dari migrasi termasuk pembatasan masuknya barang dan jasa. Krisis kesehatan mengakibatkan terhentinya aktivitas sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, bisnis, dll, yang mempengaruhi perekonomian nasional secara signifikan. Untuk mencapai tujuan bersama mengatasi COVID-19, sangat diperlukan kerjasama internasional. Dunia dapat mengatasi krisis ini melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang berfokus mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan penyebaran COVID-19. Untuk mengatasi isu keuangan global, kerjasama dapat dilakukan melalui Organisasi keuangan dunia termasuk G-20, yang merupakan kelompok negara-negara yang memiliki perekonomian kuat dan berpengaruh signifikan dalam skala global. Sayangnya kerjasama yang diharapkan belum sepenuhnya berhasil, diakibatkan perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi dan komunikasi diantara negara-negara anggota. Tidak ada satu negarapun yang mengantisipasi munculnya wabah COVID-19 sehingga diperlukan kerjasama internasional yang diawali dengan implementasi diplomasi yang efektif. Tidak saja aktor pemerintah yang terlibat tetapi juga aktor non-pemerintah termasuk media massa. Artikel ini menganalisis diplomasi multijalur untuk menghadapi “the great lockdown”, dengan menerapkan konsep diplomasi multijalur dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kehadiran aktor-aktor non-pemerintah yang memiliki sifat yang lebih fleksibel dibandingkan dengan aktor pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah koordinasi dan komunikasi yang seringkali menghambat efektivitas kerjasama. Diplomasi multijalur mengandaikan pemerintah yang berperan sebagai inisiator dan perancang kebijakan, melibatkan, menggerakkan, dan memberdayakan aktor-aktor non-pemerintah. Dengan berjalannya mekanisme diplomasi multijalur, maka semua elemen dan pemangku kepentingan dapat menjalankan peran yang optimal. Perlunya diplomasi multijalur dalam menerapkan kerjasama internasional agar tujuan bersama mengatasi Covid19 tercapai. Kesimpulan yang dapat ditarik dari situasi saat ini adalah minimnya keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam kerjasama internasional menyebabkan kurang berhasilnya upaya-upaya penanggulangan COVID-19 secara optimal dalam tataran global. Ketika kerjasama global sudah berhasil mengatasi pandemic ini, perlu dipikirkan untuk merancang mekanisme baru untuk mengantisipasi berulangnya bencana serupa di masa mendatang. Mekanisme baru dapat berupa penguatan organisasi internasional yang sudah ada, membangun tatanan baru, termasuk pelibatan aktor-aktor non-negara sebagai bagian dari mekanisme global tersebut.

**Kata kunci:** pandemi global, diplomasi multijalur, krisis kesehatan, krisis ekonomi, kerjasama internasional, organisasi internasional.

## Latar Belakang Masalah

*Coronavirus disease* (COVID-19) dikenali berjangkit untuk pertama kalinya di Kota Wuhan Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Virus jenis baru ini sebelumnya tidak ditemukan di dalam tubuh manusia, dan bersifat zoonotic, yang artinya penularan terjadi dari hewan kepada manusia. Virus corona menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan bernafas, demam tinggi, dan batuk. Dalam kasus-kasus

yang lebih parah, infeksi menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut yang parah, kegagalan ginjal, dan kematian. Rekomendasi standar untuk mencegah penularan adalah sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker wajah, dan menutup mulut ketika batuk dan

bersin.<sup>1</sup> Pasca Perang Dunia ke 2 virus COVID-19 telah menjadi bencana kemanusiaan yang paling berpengaruh secara sosial dan ekonomi. Sampai saat ini telah terjadi kasus penularan COVID-19 yang meluas di seluruh dunia dan meliputi hampir seluruh negara.

Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan COVID-19 sebagai situasi darurat yang memerlukan penanganan internasional atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO telah memperkenalkan nama virus ini sebagai “coronavirus disease 19 atau COVID-19, dan diikuti pada tanggal 11 Maret 2020 pengumuman sebagai pandemi. Pada tanggal 31 Maret para Ketua Delegasi dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan Sedunia (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan pernyataan bersama menyerukan kepada pemerintah negara untuk meminimalisir meluasnya wabah COVID-19 dengan penjagaan perbatasan dan mengawasi perdagangan dan impor makanan. Pada kondisi seperti ini merupakan momen untuk menunjukkan solidaritas, bertindak secara bertanggung jawab dan bekerja sama mencapai tujuan bersama untuk menjamin ketersediaan makanan, keamanan makanan dan nutrisi dan meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat di seluruh dunia.

Organisasi internasional seringkali disalahkan ketika terjadi masalah global, atau dikritisi karena melanggar kedaulatan negara atas nama kepentingan global, atau kegagalan dalam menerapkan agenda untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sikap menyalahkan lazim terjadi ketika menilai hubungan antara organisasi internasional dan negara-negara anggota. Tidak ada negara yang bisa menghadapi tantangan ini

sendirian, jadi kerja sama internasional merupakan kewajiban seluruh pemerintahan untuk mengatasi isu global seperti saat ini. Kerjasama terutama dengan negara-negara di kawasan termasuk dalam berkoordinasi, berbagi informasi dan bertukar pengalaman mengenai dijalankannya praktik-praktik terbaik yang sudah berhasil di negara lain.

“Lockdown” merupakan cara terbaik untuk menghambat, membatasi dan mengatasi penyebaran COVID-19 baik di dalam negeri maupun antar negara. Upaya itulah yang saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia, sehingga dunia mengalami terjadinya “The Great Lockdown”. Tetapi menanggulangi COVID-19 memerlukan upaya yang lebih serius daripada “lockdown”, menjaga jarak sosial ataupun larangan bepergian. Bahkan Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang berhasil dalam menanggulangi penyebaran virus, yang tidak banyak berarti tanpa kerjasama internasional. Kerjasama internasional sangat diperlukan mengingat tidak semua negara memberlakukan kebijakan dan memiliki sistem sosial, ekonomi, politik yang sama, sehingga terjadi variasi keberhasilan “lockdown” antara satu negara dengan lainnya. Beberapa negara masih mengingkari keberadaan virus, beberapa negara merespons dengan lambat atau tidak serius, dan beberapa negara tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengatasi masalah. Puncak pandemi global juga sampai saat ini belum pasti, termasuk kapan akan berakhir. Untuk mengatasi krisis ini, masyarakat internasional selain memerlukan kerjasama internasional dan kepemimpinan yang efektif. Contoh kepemimpinan yang efektif misalnya ketika Amerika Serikat (AS) menjalankan kebijakan perang global melawan terorisme (GWT) yang terbukti efektif. Saat ini, dalam penanganan

---

<sup>1</sup> <https://www.rtmagazine.com/disorders-diseases/infectious-diseases/other-infections/27-more-countries-documented-first-coronavirus-cases/>

COVID-19, tidak tampak adanya kepemimpinan yang efektif baik dari pemimpin negara besar seperti AS atau Ketua Lembaga Internasional seperti WHO.

### **Diplomasi Kebencanaan Terkait Penanganan COVID-19**

Secara umum, diplomasi dapat berperan dalam: 1). Menjalin hubungan antar individu (people to people contact). 2) Memperkuat proses yang membangun harmoni. 3) Menyediakan forum untuk merancang dan menerapkan kebijakan internasional. 4). Kerjasama bisnis dan perdagangan internasional. Dan 5) Manajemen kesehatan dan kebencanaan. Peran Diplomasi dalam penanganan COVID-19, merupakan penerapan dari fungsi kelima, yaitu pengelolaan kesehatan dan kebencanaan. Dalam konteks ini, dikenal istilah “Diplomasi Kebencanaan”, yang melibatkan aktor-aktor yang beragam, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penanggulangan masalah.

Istilah “diplomasi kebencanaan” (“disaster diplomacy”) terkait dengan aktivitas bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, respons dan penyembuhan, yang melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang sebelumnya bermusuhan, baik dalam skala nasional maupun internasional.<sup>2</sup> Diplomasi kebencanaan mulai dikenal ketika kota Hualien di Taiwan tahun 2018 mengalami gempa bumi dan mengundang keterlibatan dan bantuan masyarakat internasional. Begitu pula ketika Maladewa dinyatakan sebagai wilayah darurat. Pada tahun 2018 yang juga melibatkan kerjasama internasional. Dalam masalah COVID-19 ini dunia menghadapi berbagai masalah kemanusiaan termasuk bencana kemanusiaan, resesi global, hancurnya sistem kesehatan, kehancuran tatanan sosial, serta nasionalisme.

---

<sup>2</sup> “Disaster Diplomacy”, <http://www.disasterdiplomacy.org>, diakses tanggal 25 April 2020.

Tidak ada satu negarapun yang dapat menangani permasalahan ini sendirian.

### **Diplomasi Multi-jalur dan Penanganan COVID-19**

Secara umum, diplomasi merupakan hubungan resmi antara dua atau lebih negara untuk tujuan tujuan yang beragam seperti ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan. Diplomasi konvensional atau jalur pertama, hanya dilakukan oleh wakil-wakil resmi pemerintah, sementara diplomasi multijalur merupakan pelibatan berbagai aktor, pemerintah maupun bukan pemerintah, di dalam berbagai bentuk, atau jalur, yang melibatkan partisipasi dan pemangku kepentingan di dalam berbagai format. Diplomasi jalur pertama yang hanya melibatkan pemerintah, berinteraksi dan berkomunikasi hanya dengan lembaga-lembaga resmi pemerintah. Proses globalisasi yang pesat telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar dalam tujuan dan praktek diplomasi, sehingga diperlukan keterlibatan berbagai aktor, sehingga muncul konsep diplomasi multijalur. Diplomasi multijalur dapat melibatkan Kepala Negara, Penyusun Kebijakan dan Pemerintah, dengan melibatkan aktor-aktor lain seperti pelaku bisnis, kelompok profesional, akademisi, aktivis kemanusiaan, termasuk media massa sebagai aktor terpenting yang mengkomunikasikan hasil-hasil kesepakatan maupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan.<sup>3</sup> Diplomasi Multijalur adalah cara memandang secara konseptual proses diplomasi internasional dengan tujuan tujuan yang berbeda dengan sistem yang pragmatis. Keterlibatan jaringan aktivitas yang saling terkait, jika dimanfaatkan secara efektif, memberikan sumbangan yang berharga bagi penanganan masalah, melalui sumber-sumber daya yang beragam baik yang dimiliki oleh

<sup>3</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi dalam Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.

individu, institusi, dan kelompok masyarakat yang bekerjasama untuk mencapai tujuan di negara negara yang berbeda.

Sistem multijalur pada awalnya disebabkan oleh proses diplomasi yang semata mata melibatkan aktor aktor pemerintah yang kurang efektif dalam menangani masalah-masalah global yang kompleks. Lebih jauh diplomasi multijalur merupakan perluasan dari diplomasi jalur pertama dan jalur kedua. Selain kedua jalur ini pendekatan yang lebih interpersonal diperlukan dengan memfokuskan pada jaringan dari aktivitas aktivitas yang saling terkait. Diplomasi multijalur dapat berperan untuk beragam tujuan. Misalnya, membantu menjalin kerjasama dan partisipasi kelompok akar rumput dan masyarakat sipil dimana kelompok ini biasanya tidak terlibat. Diplomasi ini juga bertujuan untuk menjaga jalur komunikasi ketika aktor aktor yg mewakili pemerintah, termasuk diplomat tidak berkomunikasi secara efektif. Aktivitas ini juga dapat dipakai sebagai forum untuk membahas aksi dan kebijakan pemerintah yang membawa hasil.

Sebagai hasilnya, perhatian terhadap kesehatan dan masalah di berbagai negara telah menjadi semakin penting di dalam agenda diplomasi global yang berubah cepat. Tuntutan yang tinggi terhadap diplomasi untuk menangani kesehatan global memerlukan kerjasama yang rumit selain keterlibatan para ahli kedokteran, kemasyarakatan, pengetahuan mengenai hukum, selain kemampuan berdiplomasi yang belum dikembangkan secara sistematis baik oleh Kementerian Luar Negeri maupun kelompok profesional global dalam bidang kesehatan. Dilain pihak, harapan yang tinggi mengenai diplomasi kesehatan dalam krisis kesehatan seperti COVID-19, memerlukan inisiatif kesehatan pada tataran global tentu sudah meningkat dan tujuan tujuan diplomatik di luar fungsi diplomasi konvensional. Situasi ini

menuntut upaya untuk memperkuat jaringan antara hubungan internasional dalam bidang kesehatan dan kebijakan luar negeri menuntut baik komunitas diplomatic dan kesehatan global untuk meninjau kembali fungsi fungsi utama diplomasi. Maka yang menjadi salah satu tantangan kerjasama internasional adalah bagaimana melakukan kerjasama internasional yang sesuai, tepat, efektif, efisien, sehingga masalah bersama dapat diatasi. Dalam hal ini, perlu melibatkan para ilmuwan dalam bidang kesehatan, peneliti, dari seluruh dunia, yang dapat bekerjasama secara bebas, efektif, tanpa adanya kepentingan politik. Para ilmuwan ini diharapkan dapat memproduksi vaksin, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan.

### **Perlu Penanganan Segera**

Kerjasama internasional tidak akan berhasil efektif tanpa ada kepemimpinan. Siapa yang diharapkan dapat memimpin penanganan COVID-19 ini? Diplomasi multijalur mensyaratkan peran pemerintah sebagai inisiator dari berbagai program dan rencana aksi. Pemimpin ini yang diharapkan dapat menggerakkan aktor-aktor lainnya, termasuk organisasi profesi, Lembaga non-pemerintah, Serikat Pekerja, pengusaha, dan akademisi. Tidak kalah pentingnya adalah mengelola informasi dan jalur jalur komunikasi yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan dan mengelola informasi terkait COVID-19.

Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memikirkan kembali dan menata ulang fungsi diplomasi dibawah konsep diplomasi multijalur. Perlu dipikirkan terbentuknya kerjasama internasional jangka panjang yang melibatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam bidang kesehatan, baik organisasi profesional maupun organisasi antar pemerintah dalam menangani pandemi global seperti

Covid19. Beberapa tujuan dibawah ini dapat dipertimbangkan sebagai tujuan kerjasama internasional:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko risiko global yang kemungkinan terjadi serta penyebab utamanya.
2. Mengevaluasi praktek praktek yang berlaku dan menganalisis kapasitas pada tipe pandemi seperti COVID-19 pada tataran global.
3. Memperkirakan perbedaan sumber sumber daya yang dimiliki untuk mencegah, membangun ketahanan, dan manajemen dari tipe bencana seperti COVID-19.
4. Membangun saluran komunikasi antara kelompok ilmuwan yang memiliki keahlian khusus, ahli medis dan profesional lainnya yang relevan termasuk ahli kemasyarakatan dan kebijakan Dengan semakin meluasnya pandemic covid19, kebutuhan untuk kerjasama internasional untuk menangani baik masalah kesehatan dan krisis ekonomi telah menjadi hal yg perlu dibahas. Sementara WHO banyak melakukan kegagalan, organisasi-organisasi internasional belum cukup berperan.

### **Peran dan Kerjasama Internasional Mellaui Kelompok G-20 dan WHO**

Kelompok G20, merupakan organisasi yang diharapkan berperan besar dalam membantu penanganan COVID-19, terutama dalam aspek kerjasama ekonomi global. Pada pertemuan khusus untuk membahas COVID-19, yang dilakukan secara virtual, telah disepakati untuk menyumbangkan USD 5 triliun sebagai bantuan stimulasi ekonomi. Akan tetapi, kelompok G20,

yang merupakan forum utama untuk kerjasama ekonomi antara kekuatan ekonomi global, secara umum tidak melakukan perannya atau “missing in action” dalam kasus COVID-19.

Dengan anggota G-20 yang merupakan negara negara dengan perekonomian terbesar dan terkuat dunia, negara negara G-20 seharusnya dapat lebih banyak berperan dalam merespons krisis kesehatan dan ekonomi. Berbeda dengan ketika dunia menghadapi krisis keuangan global (GFC) pada tahun 2008-2009, ketika itu kelompok G-20 telah merubah sifat pertemuan antar para Menteri Keuangan menjadi forum utama untuk manajemen krisis. Dengan melakukan respons relative cepat melalui penerapan kebijakan yg efektif menghadapi krisis. Kekuatan istimewa adalah sifatnya yang informal yang memungkinkan keterlibatan jaringan teknokrat, pejabat-pejabat pemerintah dan birokrat untuk mengatasi rantai birokrasi organisasi organisasi internasional yang kaku untuk menghadapi global depresi. Sejak saat itu, kelompok G-20 berubah dari komite krisis menjadi komite pengarah, yang memfasilitasi kerjasama internasional dalam isu-isu yang luas, dari kesehatan sampai pengembangan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Maka dari itu, krisis saat ini mengarah pada tuntutan untuk memainkan peran sekali lagi. Ketika akhirnya bertemu pada tanggal 26 Maret para pemimpin negara G20 berjanji untuk melakukan apapun untuk mengatasi pandemic ini, meskipun pernyataan bersama yang dikeluarkan kurang menunjukkan komitmen nyata. Selain itu, respon yang disampaikan sifatnya terbatas dan tidak jelas. Secara umum sama dengan yang dikemukakan oleh Kelompok Kerja Kesehatan pada tanggal 7 Maret 2020, yang menyimpulkan pernyataan sepanjang satu halaman tanpa komitmen atau rencana aksi nyata. Ada usulan agar G-20 menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi para kepala negara G20 untuk pertemuan formal.

Pada pertemuan tanggal 26 Maret 2020, para pemimpin G-20 berjanji untuk melakukan segala cara untuk mengatasi pandemi, tetapi pernyataan bersama yang dikeluarkan kurang diikuti komitmen konkrit. Salah satu pernyataan berisi janji untuk mengucurkan dana sebesar USD 5 triliun untuk pemulihan ekonomi global. Akan tetapi tidak ada pernyataan mengenai pelarangan ekspor untuk peralatan medis, mendanai vaksin, atau menangani krisis ekonomi untuk negara negara berkembang.

Sementara pada pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dihadiri para Menteri Keuangan membawa hasil yang lebih konkrit seperti penundaan pembayaran kembali utang untuk negara negara berpendapatan rendah. Sejauh itu tidak ada aksi aksi baru terkait krisis kesehatan dan tidak ada respons tuntutan IMF untuk mendukung sumber dayanya. Sumber kegagalan untuk menangani masalah COVID-19 berawal dari sifat organisasi G20 dan termasuk konteks internasional yang lebih luas dimana organisasi ini beroperasi.

Kendala pertama, fokus organisasi pada isu finansial global. Kelompok G-20 beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral dan para pejabat yang bergerak di bidang keuangan. Tidak semua masalah didiskusikan dalam G-20. Sifat organisasi ini menjadi kunci keberhasilan ketika merespons krisis keuangan global, sementara tidak menghasilkan aksi nyata dalam krisis pandemic Covid-9. Tidak ada diskusi terkait misalnya penundaan utang. Fokus terhadap keuangan, berarti tidak mengindahkan masalah seperti kesehatan, yang seakan berada diluar kewenangan para perancang kebijakan keuangan.

Perluasan keanggotaan G-20 menyebabkan para anggota tambahan merasa tidak nyaman karena adanya fokus pada isu keuangan seperti yang tampak selama krisis pandemic COVID-19. Hal

ini tidak berarti bahwa G20 kurang partisipatif dari para pemangku kepentingan yang lebih luas. Sesungguhnya, dekade terakhir telah terlihat institusionalisasi dari kelompok yang terlibat, dengan mengintegrasikan aktor-aktor dari masyarakat sipil ke dalam G-20, termasuk organisasi non-pemerintah/NGO, Serikat Pekerja, perempuan, akademisi, dan asosiasi bisnis. Harapannya keterlibatan mereka dapat membawa perspektif yang lebih luas ke dalam agenda yang dibahas.

Kelompok kelompok ini telah melakukan *lobby* terhadap negara-negara yang berpengaruh untuk meninjau permasalahan krisis kesehatan COVID-19 secara holistik, termasuk secara sungguh sungguh membahas dimensi kesehatan dan lebih jauh lagi seperti masalah pengelolaan utang. Upaya mereka sejauh ini tidak membawa hasil.

Proses keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam upaya turut partisipasi dalam menangani masalah COVID-19 menghadapi tantangan berat, terutama ketika para pejabat di dalam G-20 memperlakukan masukan dan usulan sebagai kesempatan untuk membarter prioritas kebijakan. Usulan-usulan tersebut seringkali tidak dipandang sebagai upaya membantu penanganan untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai kompensasinya, masyarakat sipil mempublikasikan pernyataan bersama di luar forum, meskipun dengan pengaruh yang tidak signifikan. Masalah terbesar adalah fakta bahwa situasi krisis ini menuntut aksi dan inisiatif yang hanya dapat dilakukan oleh pemimpin negara. Kehadiran para kepala negara saja tidaklah cukup, apalagi di beberapa negara terdapat pemimpin-pemimpin “populis”, yang menolak terbentuknya pemerintahan global dan kerjasama internasional. Selain itu, krisis yang terus berlanjut di beberapa negara disebabkan oleh perbedaan-perbedaan karakteristik negara, pendapatan ekonomi, mobilitas sosial, dan meningkatnya angka pengangguran dan

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal-hal tersebut masih belum menjadi topik pembahasan dan penyelesaian. Negara-negara anggota G20 tidak memiliki kebebasan keluar dari tanggung jawab ini, yang sudah diusahakan sejak tahun 2010 untuk menghasilkan solusi yang berarti.

Hasilnya, rasa percaya diri dalam efektifitas kerjasama internasional telah menurun drastis, dimana negara-negara anggota G-20 secara luas terbagi atas perbedaan Utara-Selatan. Dalam konteks inilah, tidak mengherankan bahwa respons dari para pemimpin G-20 adalah lebih menonjolkan perbedaan, selain terlibat menjalankan kebijakan membantu negara-negara miskin. Singkatnya, kegagalan negara-negara anggota G-20 dalam menunjukkan kekuatan kerjasama global berasal dari sifat alamiahnya sebagai organisasi. Ada sedikit harapan agar terjadi perubahan mendasar dari masalah yang dihadapi, baik melalui respons yang efektif, dalam menghadapi krisis kesehatan atau munculnya agenda baru untuk menghadapi krisis ekonomi. Bahkan sebelum diberlakukannya “Great Lockdown”.

Terhadap kinerja WHO, sudah muncul tuntutan untuk melakukan penilaian global secara independen dalam mengatasi pandemi COVID-19. Termasuk mengkritisi keterbukaan laporan pemerintah Tiongkok. Presiden AS Donald Trump sudah mengumumkan penghentian pendanaan untuk WHO, yang menyebabkan semakin rumitnya permasalahan. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan penyesalannya mengetahui keputusan AS. Bahaya lebih besar adalah apakah negara-negara lainnya juga akan menunda bantuan untuk anggaran, yang akan mengakibatkan pencegahan terhadap pandemi COVID-19 menjadi semakin sulit. Saat ini COVID-19 telah menyebar ke negara-negara berkembang yang tidak memiliki sistem

kesehatan yang memadai. Ketiadaan dana juga berarti menunda berbagai rencana aksi untuk menangani masalah kesehatan lainnya yang juga perlu ditangani organisasi.

Walaupun demikian, WHO tidak boleh menghentikan atau memperlambat upaya-upaya penanganan COVID-19 yang merupakan tugas penting yang menyangkut nyawa dan kehidupan. Saat ini bukan pertama kalinya WHO mengalami kritikan, termasuk ketika kritikus melihat kesalahan dalam merespon terjadi epidemi virus ebola di Afrika Barat pada tahun 2014. Sehingga, pandemi global tidak mungkin teratasi tanpa adanya mekanisme kerjasama yang dirancang di dalam organisasi WHO. Dalam mendukung upaya menjamin keamanan kesehatan, tugas-tugas operasional WHO hanya dimungkinkan oleh tindakan-tindakan oleh pemerintah, yang tetap berperan sebagai aktor utama, dalam setiap respons.

Struktur operasional WHO dijalankan oleh 194 negara anggotanya, dengan landasan konstitusi WHO, yaitu sidang Umum Kesehatan Dunia. Sidang Umum ini terdiri atas negara-negara anggota memiliki kekuasaan untuk memberlakukan kebijakan, menyetujui anggaran, dan menilai aktivitas dari Dewan Eksekutif dan Sekretariat. Negara-negara anggota menjalankan peran penting di dalam fungsi organisasi, meskipun bukan berarti birokrasi WHO tanpa cacat. Organisasi ini tidak terlepas dari pengaruh kebijakan dalam negeri, yang seringkali direfleksikan melalui prioritas nasional dalam proses penentuan agenda.

Standar kerjasama yang lebih baik penting untuk dilakukan saat ini oleh organisasi-organisasi internasional, khususnya ketika situasi gawat tidak dapat dihindarkan. WHO bukannya tidak ada kesalahan, tetapi kekuatan bersama negara-negara anggota, termasuk AS, untuk menentukan operasional organisasi ini dan termasuk

pengalokasian anggaran dialokasikan. Perlu upaya-upaya lain untuk membantu Organisasi internasional untuk menemukan skema dan format kerjasama yang lebih baik. Mengkritisi WHO untuk salah pengelolaan dan respons tidak membantu tanpa diikuti oleh peningkatan kinerja dari masing-masing negara anggota.

## **Kesimpulan**

Kondisi saat ini ketika minim dan tidak efektifnya kerjasama internasional dapat digambarkan sebagai negara-negara yang “berjuang di medan perangnya masing-masing”. Selain itu, masing-masing negara tanpa berkoordinasi, hanya berdasarkan realitas yang dihadapi masing-masing negara. Padahal penanganan Covid19 ini memerlukan kerjasama yang luas, koordinasi, dan ditambah dengan kepemimpinan yang efektif. Sesungguhnya kita sudah memiliki seperangkat institusi serta global serta inisiatif global, akan tetapi belum cukup berperan ketika beberapa negara besar tidak menghadapi masalah yang sama.

Melihat performa dari Organisasi Internasional yang berkompeten dalam menangani isu kesehatan (WHO) dan keuangan Global (G20), kedua organisasi masih belum melakukan kerjasama yang efektif untuk menangani masalah pandemic global ini. Masalah yang dihadapi adalah tidak efektifnya kolaborasi antara organisasi internasional dengan pemangku kepentingan lainnya terkait kedua bidang tersebut. Organisasi-organisasi non-pemerintah

masih belum banyak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan aksi-aksi nyata. Yang tidak kalah penting adalah tidak terlibatnya organisasi-organisasi internasional serta pemerintah negara dalam mengelola media global. Media massa dapat berperan besar dalam mempublikasikan informasi terkini mengenai kondisi pandemi yang sesungguhnya terjadi, sehingga masyarakat awam dapat lebih terinformasi mengenai situasi yang sebenarnya dan dihadapi masing-masing negara. Media juga dapat dimanfaatkan untuk mempublikasikan praktek-praktek terbaik penanganan pandemic oleh negara-negara yang sudah terlebih dahulu berhasil dalam mengatasi wabah COVID-19.

## **Daftar Referensi**

Djelantik, Sukawarsini, *Diplomasi Dalam Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.

World Health Organization, *Infectious Diseases*, <https://www.who.int>.

“Disaster Diplomacy”, <http://www.disasterdiplomacy.org>

RT magazine, *36 More Countries Documented First Coronavirus Cases*, <https://www.rtmagazine.com/disorders-diseases/infectious-diseases/other-infections/36-more-countries-documented-first-coronavirus-cases/>